

## DINAMIKA JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KAWASAN BEBAS SAMPAH DI KELURAHAN CIHARUGEULIS DAN CISARANTEN BINA HARAPAN KOTA BANDUNG

Muhammad Ihsan Maulana<sup>1</sup>, Bonti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
Email Korespondensi : muhammad22161@mail.unpad.ac.id

*Submitted: 12-02-2026; Accepted: 28-03-2026; Published : 01-04-2026*

### ABSTRAK

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandung menghadapi tantangan serius akibat tingginya timbulan sampah, keterbatasan fasilitas pemrosesan akhir, serta ketergantungan pada perubahan perilaku masyarakat. Program Kawasan Bebas Sampah dikembangkan sebagai respons kebijakan berbasis kawasan untuk mendorong pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat sumber. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika jejaring kebijakan dalam Program Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung dengan melihat variasi dinamika jejaring dan capaian program di Kelurahan Cihaurgeulis dan Kelurahan Cisaranten Bina Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dibentuk oleh keterkaitan antara pemaknaan aktor terhadap kebijakan, pola relasi sosial yang bersifat strategis, kerangka institusional yang memunculkan tekanan administratif, praktik manajemen jejaring yang pragmatis, perkembangan eksternal berupa kebijakan kota dan krisis persampahan, serta proses interaksi yang berlangsung secara bertahap. Capaian program tidak berkembang secara linier, melainkan melalui kebuntuan dan penyesuaian yang menghasilkan hasil substantif, prosedural, dan institusional yang tidak selalu seimbang antarwilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Program Kawasan Bebas Sampah lebih tepat dipahami sebagai kemampuan jejaring kebijakan untuk beradaptasi, menjaga keberlanjutan interaksi, dan membentuk perubahan praktik secara bertahap di tingkat lokal.

**Kata kunci:** Jejaring kebijakan, Pengelolaan sampah, Kawasan Bebas Sampah.

### ABSTRACT

*Household waste management in Bandung City faces serious challenges due to high waste generation, limited final processing facilities, and strong dependence on changes in community behavior. The Waste-Free Area Program was developed as an area-based policy response to promote waste separation and processing at the source. This study aims to analyze the dynamics of policy networks within the implementation of the Waste-Free Area Program in Bandung City by examining variations in network dynamics and program outcomes in Cihaurgeulis Subdistrict and Cisaranten Bina Harapan Subdistrict. The study employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that program implementation is shaped by the interconnection between actors' interpretations of the policy, strategic social relations, institutional frameworks that generate administrative pressures, pragmatic network management practices, external developments in the form of municipal policies and waste management crises, and interaction processes that evolve incrementally. Program outcomes do not develop in a linear manner, but emerge through periods of stagnation and adjustment that produce substantive, procedural, and institutional results that are uneven across areas. This study concludes that the effectiveness of the Waste-Free Area*

*Program is better understood as the capacity of policy networks to adapt, sustain interactions, and gradually shape changes in local practices.*

**Key word:** Policy networks; Waste management; Waste-Free Area.

## PENDAHULUAN

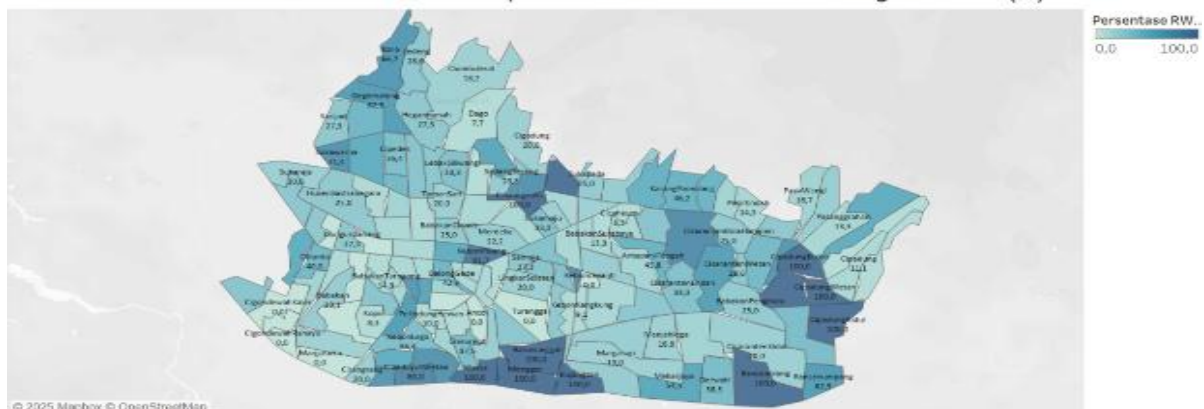
Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan persoalan krusial di kota-kota besar, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan daya dukung lingkungan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang tidak efektif berdampak pada degradasi lingkungan perkotaan, peningkatan risiko kesehatan masyarakat, serta menurunnya kualitas hidup warga (Banerjee et al., 2015; Yadav & Samadder, 2018; Méndez-Lazarte et al., 2023). Permasalahan ini semakin kompleks ketika kebijakan pengelolaan sampah masih berorientasi pada pembuangan akhir dan belum secara konsisten mendorong pengurangan sampah di tingkat sumber.

Kondisi tersebut tercermin di Kota Bandung. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton per hari, dengan lebih dari 60 persen berasal dari aktivitas rumah tangga (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Komposisi ini menempatkan rumah tangga sebagai kontributor utama timbulan sampah sekaligus titik strategis intervensi kebijakan. Tanpa perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, upaya pengendalian timbulan sampah perkotaan cenderung menghasilkan dampak yang terbatas.

Di sisi lain, Kota Bandung menghadapi keterbatasan struktural dalam pengelolaan sampah karena tidak memiliki fasilitas tempat pemrosesan akhir di wilayahnya sendiri sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap fasilitas pemrosesan akhir di wilayah penyangga. Sejumlah krisis pengelolaan, seperti longsor TPA Leuwigajah pada tahun 2005 dan kebakaran TPPAS Sarimukti pada tahun 2023, menunjukkan rapuhnya sistem yang bertumpu pada solusi hilir (Pradana, 2025; Deny, 2025). Kebakaran Sarimukti memicu pembatasan ritasi pengangkutan sampah dan menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik kota sepanjang tahun 2024 (Herlambang, 2025; Syafei & Susanti, 2025). Situasi ini menegaskan perlunya penguatan pengelolaan sampah berbasis pengurangan di sumber.

Sebagai respon terhadap kondisi yang ada, Pemerintah Kota Bandung mengembangkan Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) yang berlandaskan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah, serta diperkuat melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor 146-DLH/2023 dan Instruksi Wali Kota Nomor 005-Bagtapem/2025. Program KBS dirancang untuk mendorong pemilahan sampah di sumber, pengolahan sampah berbasis kawasan, serta pengurangan residu yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2025).

Sebaran Presentase RW Kawasan Bebas Sampah Perkelurahan di Kota Bandung Juni 2025 (%)



**Gambar 1. Peta Sebaran Presentase RW KBS Perkelurahan di Kota Bandung Juni 2025**

Sumber: Data primer diolah peneliti menggunakan perangkat Tableau (2025)

Meskipun kebijakan dan kerangka regulasi telah tersedia, implementasi Program Kawasan Bebas Sampah menunjukkan variasi capaian yang cukup signifikan antarwilayah. Hasil Monitoring dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung pada Juni 2025 menunjukkan bahwa capaian KBS belum merata antarwilayah. Sebagian kelurahan telah mencapai status KBS secara penuh, sementara kelurahan lain masih berada pada tahap awal pemilahan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2025). Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di beberapa wilayah masih tidak konsisten dan bergantung pada tokoh lokal atau kader lingkungan tertentu. Selain itu, mekanisme pelaporan capaian KBS masih menghadapi persoalan akurasi, ditandai dengan perbedaan antara data administratif dan kondisi faktual di lapangan.

Dalam perspektif kebijakan publik, variasi capaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program KBS tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan oleh bagaimana jejaring kebijakan bekerja dalam praktik. Jejaring kebijakan berfungsi sebagai arena interaksi antaraktor pemerintah, pendamping, dan masyarakat dalam pertukaran informasi, sumber daya, dan legitimasi (Rhodes, 2007; Provan & Kenis, 2008). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jejaring kebijakan yang kuat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan kebijakan lingkungan berbasis komunitas (Koontz & Newig, 2014; Kushwah et al., 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan, sebagian besar studi masih menekankan aspek teknis pengelolaan sampah, perubahan perilaku rumah tangga, atau efektivitas instrumen kebijakan secara umum. Kajian yang secara khusus menelaah dinamika jejaring kebijakan dalam implementasi program pengelolaan sampah berbasis kawasan masih relatif terbatas, terutama pada tingkat lokal seperti kelurahan atau komunitas warga. Padahal, implementasi kebijakan lingkungan yang melibatkan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan atau ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh bagaimana interaksi antaraktor dalam jejaring kebijakan berlangsung dalam praktik sehari-hari. Dengan

demikian, terdapat kebutuhan untuk memahami bagaimana konfigurasi relasi antaraktor, proses interaksi, serta strategi pengelolaan jejaring memengaruhi capaian kebijakan lingkungan berbasis komunitas.

Dalam konteks Kota Bandung, Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) merupakan kebijakan yang secara eksplisit mengandalkan keterlibatan berbagai aktor dalam jejaring kebijakan, mulai dari pemerintah daerah, pendamping program, perangkat wilayah, hingga masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Namun, variasi capaian implementasi antarwilayah menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi, tetapi juga pada dinamika jejaring kebijakan yang berkembang di masing-masing wilayah. Oleh karena itu Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika jejaring kebijakan dalam implementasi Program Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung dengan fokus pada interaksi antaraktor, pengelolaan jejaring, serta implikasinya terhadap capaian program di tingkat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika kebijakan sebagai proses sosial yang berlangsung dalam konteks tertentu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam proses, interaksi, serta konstruksi makna yang terbentuk dalam praktik kebijakan publik yang bersifat kompleks dan tidak linier (Creswell, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi guna menangkap variasi perspektif aktor serta praktik implementasi Program Kawasan Bebas Sampah di tingkat lokal.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan variasi capaian implementasi Program Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung berdasarkan data Hasil Evaluasi Monitoring DLH Kota Bandung Bulan Juni 2025. Kelurahan Cihaurgeulis dipilih karena menunjukkan capaian implementasi program yang relatif tinggi dengan 12 dari 12 RW telah berstatus Kawasan Bebas Sampah. Sebaliknya, Kelurahan Cisaranten Bina Harapan dipilih karena masih berada pada tahap awal implementasi dengan jumlah RW berstatus KBS

hanya 3 dari 12 RW. Pemilihan dua lokasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lengkap mengenai dinamika jejaring kebijakan dalam konteks capaian implementasi yang berbeda.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung, peran, dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan program, sehingga data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian (Patton, 2015). Informan tersebut meliputi perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, pendamping Program KBS di tingkat kecamatan, kader lingkungan, pengelola bank sampah, serta warga yang terlibat dalam kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat RW. Melalui variasi informan tersebut, penelitian ini berupaya menangkap beragam perspektif aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah di tingkat lokal.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al. (2014), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara simultan dan berulang. Model ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara sistematis seiring dengan berkembangnya pemahaman terhadap temuan lapangan. Proses analisis didukung oleh perangkat lunak Nvivo 12 untuk membantu pengelolaan, pengodean, dan penelusuran pola data kualitatif secara lebih terstruktur. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas serta keandalan temuan penelitian dengan membandingkan berbagai sumber data dan hasil pengamatan (Creswell & Miller, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kerangka *governance network* sebagaimana dikembangkan oleh Klijn et al. (2025) digunakan untuk memahami jejaring kebijakan sebagai proses interaksi antaraktor yang saling bergantung, di mana arah dan hasil kebijakan terbentuk melalui dinamika jejaring kebijakan yang berkembang dari waktu ke waktu. Dalam perspektif ini, kebijakan publik tidak dipandang sebagai produk keputusan hierarkis yang bersifat linier, melainkan sebagai hasil dari negosiasi, penyesuaian, dan pertukaran sumber daya antaraktor dengan kepentingan dan kapasitas yang beragam. Pendekatan ini relevan untuk membaca implementasi Program

Kawasan Bebas Sampah sebagai kebijakan berbasis masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan pola relasi antaraktor.

Mengacu pada kerangka Klijn et al. (2025), dinamika jejaring kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah elemen kunci yang bekerja secara simultan. Faktor kognitif membentuk cara aktor memaknai tujuan dan masalah kebijakan, faktor sosial memengaruhi pola relasi dan strategi interaksi antaraktor, sementara faktor institusional membingkai interaksi melalui aturan formal dan praktik informal. Di samping itu, manajemen jejaring berperan dalam mengelola ketegangan dan menjaga keberlangsungan interaksi, sedangkan perkembangan eksternal dan proses interaksi menjelaskan bagaimana jejaring beradaptasi terhadap perubahan konteks serta mengalami fase kebuntuan dan terobosan. Elemen-elemen tersebut saling berkelindan dalam membentuk arah dan kualitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menganalisis dinamika jejaring kebijakan dalam implementasi Program Kawasan Bebas Sampah melalui enam elemen utama yaitu *cognitive factors*, *social factors*, *institutional factors*, *network management*, *external development*, dan *interaction rounds*.

Dalam konteks Program Kawasan Bebas Sampah di Cihargeulis dan Cisaranten Bina Harapan, konfigurasi elemen jejaring tersebut menghasilkan dinamika implementasi yang tidak seragam. Perbedaan capaian program tidak semata-mata mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, tetapi menunjukkan bagaimana jejaring kebijakan terbentuk, dikelola, dan beradaptasi dalam menghadapi keterbatasan serta tekanan konteks lokal. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya menelusuri setiap elemen jejaring untuk menunjukkan bagaimana interaksi, penyesuaian, dan pembelajaran antaraktor membentuk capaian, keterbatasan, serta pola adaptasi kebijakan di tingkat lokal.

Pada implementasi Program Kawasan Bebas Sampah di kedua wilayah penelitian, jejaring kebijakan terbentuk melalui keterlibatan sejumlah aktor dengan peran yang berbeda. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung berperan sebagai *leading sector* yang menetapkan arah kebijakan, menyediakan pedoman pelaksanaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi program. Di tingkat wilayah, kecamatan dan kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan kota dan

pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat. Pendamping Program Kawasan Bebas Sampah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan warga serta memberikan pendampingan teknis dalam kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah.

Selain itu, terdapat pengelola bank sampah juga memiliki peran penting dalam jejaring kebijakan KBS karena menghadirkan dimensi ekonomi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui mekanisme penimbangan dan penyaluran sampah anorganik, bank sampah memberikan insentif ekonomi. Terdapat pula masyarakat di tingkat RW menjadi aktor utama dalam praktik pengelolaan sampah sehari-hari. Interaksi antaraktor tersebut membentuk suatu jejaring kebijakan yang menjadi arena koordinasi, pertukaran informasi, serta mobilisasi partisipasi masyarakat dalam implementasi Program Kawasan Bebas Sampah di tingkat lokal.

### A. Cognitive Factors

Faktor kognitif dalam jejaring kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah tercermin dari cara aktor memahami tujuan, makna, dan orientasi program dalam praktik sehari-hari. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemahaman aktor terhadap KBS tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk dari pengalaman implementasi, intensitas pendampingan, serta interaksi dengan aktor lain dalam jejaring. Pada wilayah Cihaurgeulis yang lebih tinggi, pemahaman aktor cenderung mengarah pada KBS sebagai proses perubahan perilaku dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sampah. Sebaliknya, pada wilayah dengan capaian yang lebih rendah, KBS lebih sering dipahami sebagai program formal yang berkaitan dengan pemenuhan indikator administratif.

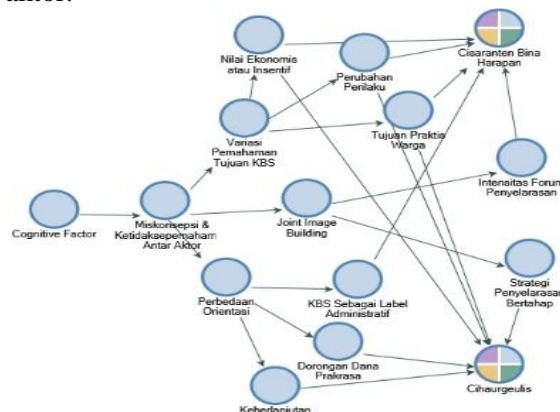
Aktor belajar membedakan antara tujuan ideal program dan batas kemampuan aktual wilayahnya. Beberapa pengelola menyebut bahwa pemahaman mereka terhadap KBS justru berkembang setelah menghadapi kegagalan awal, seperti rendahnya partisipasi warga atau tidak berfungsinya sarana pengolahan. Pada masyarakat, pemahaman program sering kali muncul secara bertahap, dimulai dari mengikuti arahan sederhana sebelum memahami tujuan yang lebih luas. Proses ini menunjukkan bahwa pemaknaan kebijakan terbentuk melalui praktik berulang,

bukan hanya melalui sosialisasi formal. Sehingga memang di tingkat pelaksana wilayah, pemahaman terhadap Program Kawasan Bebas Sampah banyak dibentuk oleh pengalaman *trial and error* selama program berjalan melalui proses *joint image building*. Seperti yang disampaikan oleh kedua pendamping KBS baik dari wilayah Cihaurgeulis maupun Cisaranten Bina Harapan, sebagai berikut:

“Nah, itu kalo forum ya itu kita biasanya gunain buat penyelarasan lah ibaratnya, itu pertemuannya sering. Kalo Cisbinhar pertemuan kita dengan kelurahan, RW dan masyarakat termasuk sering bahkan kadang saya amaze dengan Cisbinhar setiap pertemuan itu selalu banyak yang hadir.” (Pendamping KBS Cisaranten Bina Harapan, Wawancara 2026)

“.....dari hasil profiling ini, nanti kita adakan sosialisasi. Tapi sosialisasi ini dilakukan hanya dengan pengurus saja dulu. Karena untuk ngebangun komitmen, itu kan harus pengurusnya dulu Kang. Karena masyarakat mah menurut saya, hal paling mudah terjun ke masyarakat mah. Dan itu harusnya ditaruh di akhir.” (Pendamping KBS Cihaurgeulis, Wawancara 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *joint image building* dalam jejaring KBS dilakukan secara bertahap melalui forum-forum yang disesuaikan dengan proses pembentukan program. Forum tidak hanya menjadi media penyampaian informasi, tetapi juga ruang penyelarasan pemahaman antaraktor seperti pengurus wilayah, pendamping, dan perangkat kelurahan. Tingginya frekuensi pertemuan di Cisaranten Bina Harapan menunjukkan bahwa intensitas interaksi berperan penting dalam membangun kesamaan perspektif di antara para aktor.



**Gambar 2. Pola Cognitive Factors dalam Jejaring Kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah**  
Sumber: Data primer diolah peneliti menggunakan Perangkat Nvivo 12 (2026)

Hasil analisis Nvivo 12 pada seluruh transkrip wawancara dan dokumen kebijakan memperlihatkan perbedaan penekanan tema kognitif antarwilayah. Pengodean data wawancara menunjukkan bahwa tema-tema yang berkaitan dengan pemahaman tujuan program, kesadaran terhadap dampak sampah, dan makna pemilahan muncul lebih konsisten pada wilayah dengan capaian program yang lebih stabil. Sementara itu, pada wilayah dengan capaian terbatas, tema yang dominan berkaitan dengan instruksi pelaksanaan, target RW, dan kewajiban program. Pola ini menunjukkan bahwa perbedaan konstruksi kognitif aktor berhubungan dengan cara mereka merespons dan menjalankan program di tingkat lokal.

Dalam kerangka jejaring kebijakan, variasi faktor kognitif tersebut memengaruhi arah dan kualitas interaksi antaraktor. Pemahaman yang bersifat substantif mendorong komitmen dan konsistensi tindakan dalam jejaring, sedangkan pemahaman yang bersifat administratif cenderung menghasilkan partisipasi yang reaktif dan bergantung pada dorongan eksternal. Dengan demikian, faktor kognitif berperan sebagai fondasi awal yang membentuk dinamika jejaring kebijakan dan berimplikasi pada capaian Program Kawasan Bebas Sampah.

### **B. Social Factor**

Faktor sosial dalam jejaring kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah tidak terbentuk secara alamiah, melainkan dikonstruksikan melalui strategi relasi antaraktor. Temuan lapangan menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam program KBS berlangsung tidak merata dan bersifat selektif, tergantung pada konteks wilayah dan strategi aktor lokal. Di beberapa arena, interaksi antaraktor berjalan rutin dan terstruktur, sementara di arena lain hubungan bersifat terbatas atau bahkan tidak terhubung secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sosial dalam KBS lebih merupakan hasil dari pengelolaan relasi dibandingkan ikatan sosial yang tumbuh secara spontan.

Keterlibatan warga dalam KBS dipengaruhi oleh ritme kehidupan sehari-hari di wilayah masing-masing. Warga yang memiliki waktu luang atau aktivitas rutin di lingkungan cenderung lebih mudah terlibat dibandingkan warga yang bekerja di luar wilayah. Aktor pengelola menyesuaikan pendekatan sosial

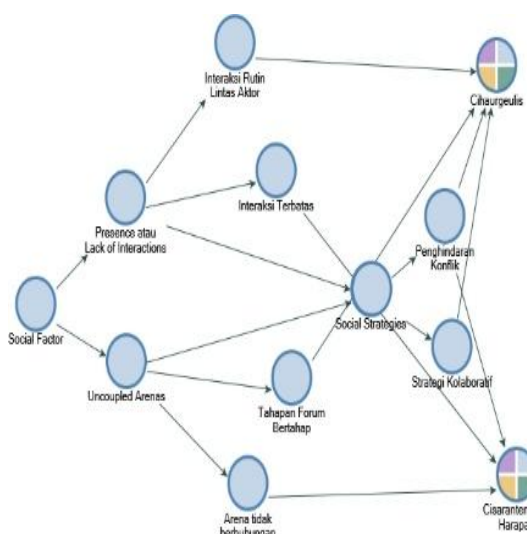
dengan karakter tersebut, misalnya dengan mengaitkan kegiatan KBS dengan agenda rutin warga. Dalam beberapa RW, partisipasi meningkat ketika kegiatan KBS disandingkan dengan kegiatan sosial lain. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sosial KBS melekat pada struktur aktivitas masyarakat setempat, bukan berdiri sebagai kegiatan terpisah.

Faktor sosial dalam jejaring KBS tidak hanya ditentukan oleh keberadaan interaksi antaraktor, tetapi juga oleh sejauh mana berbagai arena interaksi dalam jejaring tersebut saling terhubung atau justru berjalan secara terpisah. Arena interaksi tersebut dapat berupa forum RW, kegiatan sosialisasi KBS, maupun pertemuan antaraktor lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Keterhubungan antar arena menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi, pesan, dan tujuan program dapat disampaikan secara konsisten kepada para aktor yang terlibat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterhubungan tersebut umumnya terbentuk melalui tahapan kegiatan dan forum-forum tertentu dalam proses implementasi program. Kondisi ini sebagaimana tercermin dalam penjelasan Informan di Cihargeulis mengenai proses awal pembentukan Kawasan Bebas Sampah.

“Biasanya forum itu dibuat kita di awal, karena ada tahapannya ya sebelum jadi KBS itu. Kita tahapan awalnya kita profiling dulu...” (Pendamping KBS Cihargeulis, Wawancara 2026)

“Kalau dengan RW dan kelurahan, relatif sama. Mereka juga sudah paham kalau KBS ini jangka panjang... Jadi visi internalnya sudah satu arah.” (Pengelola Bank Sampah Cihargeulis, Wawancara 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa aktor, arena interaksi dalam jejaring KBS cenderung saling terhubung dan memperkuat satu sama lain. Tahapan seperti profiling, sosialisasi, dan koordinasi internal membentuk kesinambungan antarforum sehingga memungkinkan penyelarasan informasi dan tujuan program di antara aktor pelaksana. Namun, keterhubungan ini belum sepenuhnya meluas hingga menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun arena internal relatif terintegrasi, terdapat potensi terjadinya uncoupled arenas ketika interaksi memasuki tingkat warga.



**Gambar 3. Pola Social Factors dalam Jejaring Kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah**

Sumber: Data primer diolah peneliti menggunakan Perangkat Nvivo 12 (2026)

Hasil analisis Nvivo pada seluruh transkrip wawancara dan dokumen kebijakan menempatkan *social strategies* sebagai node sentral yang menghubungkan berbagai pola interaksi sosial. Node interaksi rutin lintas aktor dan strategi kolaboratif memiliki keterkaitan kuat dengan wilayah Cihaurgeulis, yang menunjukkan bahwa aktor secara aktif membangun relasi untuk menjaga keberlangsungan program. Sebaliknya, pada Cisaranten Bina Harapan, pola yang dominan berkaitan dengan interaksi terbatas, arena tidak berhubungan, dan tahapan forum bertahap, yang mencerminkan fragmentasi relasi sosial dalam jejaring. Selain itu, kemunculan node penghindaran konflik menunjukkan bahwa aktor cenderung mengelola relasi secara hati-hati untuk mencegah gesekan sosial yang berpotensi menghambat implementasi program.

Dalam konteks jejaring kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa faktor sosial bekerja sebagai mekanisme adaptif dalam menjaga stabilitas jejaring. Strategi pengelolaan interaksi memungkinkan aktor mempertahankan kerja sama di tengah keterbatasan partisipasi dan fragmentasi arena. Namun, ketergantungan pada strategi sosial semacam ini juga membuat jejaring menjadi rapuh ketika tidak disertai pelembagaan relasi yang lebih inklusif. Dengan demikian, faktor sosial dalam Program KBS berperan penting dalam menentukan arah dan kualitas interaksi jejaring, sekaligus menjelaskan perbedaan capaian program antarwilayah.

### C. Institutional Factor

Faktor institusional dalam jejaring kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) berkaitan dengan bagaimana aturan formal, praktik informal, dan struktur kelembagaan membentuk arah implementasi di tingkat lokal. Secara normatif, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung telah memiliki dasar institusional yang cukup kuat. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) yang menekankan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak sebagai prinsip utama pengelolaan sampah. Selain itu, dokumen teknis Program Kawasan Bebas Sampah juga mengatur tahapan pembentukan KBS yang mencakup aspek kelembagaan, mulai dari pembentukan struktur pengelola hingga mekanisme pelaporan.

Legitimasi kelembagaan tersebut semakin diperkuat melalui Instruksi Wali Kota yang dikeluarkan oleh Bagian Tata Pemerintahan (Bagatpem) Nomor 005, yang mendorong peningkatan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas aktor di tingkat kewilayahan dengan melibatkan unsur Forkopimcam, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, serta masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengelolaan sampah. Instruksi ini menyatakan bahwa:

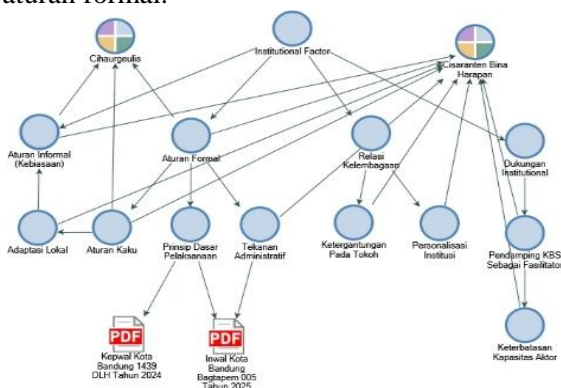
“Optimalisasi sinergitas, koordinasi dan kolaborasi dengan jajaran Forkopimcam, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan unsur masyarakat lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi, edukasi penanganan dan pengolahan sampah kepada warga masyarakat di setiap Kecamatan.” (Inwal 005-Bagtapem 2025)

Instruksi tersebut menunjukkan bahwa secara resmi pemerintah daerah telah memberikan mandat dan pengakuan kelembagaan yang jelas terhadap keterlibatan aktor non-pemerintah dan kelembagaan lokal dalam jejaring kebijakan KBS. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa legitimasi normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kelembagaan di tingkat RW dan kelurahan. Penetapan indikator serta target program memperkuat orientasi administratif dalam pelaksanaan KBS, sehingga dalam beberapa kasus aktor lebih menitikberatkan pada

memenuhi indikator formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aturan formal tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai mekanisme pengendali yang memengaruhi prioritas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Di luar kerangka formal tersebut, pelaksanaan KBS juga dipengaruhi oleh praktik dan kesepakatan informal yang berkembang sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan kondisi setempat. Aturan informal ini biasanya muncul ketika ketentuan formal sulit diterapkan secara konsisten dalam konteks lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Pengelola Bank Sampah Cisaranten Bina Harapan dalam wawancara, bahwa secara formal aturan pemilahan sampah telah ditetapkan oleh DLH dan pihak kelurahan, yaitu dengan memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu sejak dari rumah tangga. Namun, dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara penuh oleh warga. Kondisi ini kemudian mendorong munculnya kebiasaan atau aturan tidak tertulis sebagai bentuk penyesuaian di lapangan. Misalnya, ketika warga belum mampu melakukan pemilahan sejak dari rumah, sampah tetap dikumpulkan terlebih dahulu dan proses pemilahan dilakukan di bank sampah atau rumah maggot agar kegiatan program tetap dapat berjalan.

Selain itu, pembagian peran antaraktor tidak selalu mengikuti struktur yang tercantum dalam dokumen kebijakan. Beberapa fungsi dijalankan secara rangkap oleh aktor yang sama karena keterbatasan sumber daya manusia. Aktor wilayah sering mengandalkan kesepakatan tidak tertulis untuk membagi tugas dan tanggung jawab. Ketika terjadi pergantian pengurus, pola kerja ini perlu dibangun ulang, sehingga kontinuitas program sempat terganggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan KBS sangat dipengaruhi oleh stabilitas aktor, bukan hanya oleh keberadaan aturan formal.



**Gambar 4. Pola *Institutional Factor* dalam Jejaring Kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah**

Sumber: Data primer diolah peneliti menggunakan Perangkat Nvivo 12 (2026)

Hasil analisis Nvivo pada seluruh transkrip wawancara dan dokumen kebijakan menunjukkan bahwa faktor institusional dalam jejaring KBS tersusun dari keterkaitan antara aturan formal, adaptasi informal, dan relasi kelembagaan yang dipersonalisasi. Visualisasi pengodean memperlihatkan ketergantungan yang kuat pada figur tertentu serta peran pendamping KBS sebagai fasilitator komunikasi antaraktor, meskipun dengan keterbatasan kapasitas. Konfigurasi ini membentuk jejaring yang relatif fleksibel namun rentan terhadap perubahan aktor dan tekanan administratif. Dengan demikian, faktor institusional tidak hanya membingkai pelaksanaan KBS, tetapi juga menentukan stabilitas dan keberlanjutan jejaring kebijakan di tingkat lokal.

#### D. *Network Management*

Manajemen jaringan dalam Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan interaksi sehari-hari antaraktor di tengah keterbatasan kewenangan dan kapasitas di tingkat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat aktor dengan otoritas dominan yang mengendalikan jejaring KBS, sehingga keberlangsungan program sangat bergantung pada kemampuan aktor mengelola relasi secara pragmatis. Manajemen jejaring dijalankan bukan melalui mekanisme komando formal, melainkan melalui pengaturan interaksi, komunikasi informal, dan penyelesaian persoalan secara bertahap dan tidak konformatif. Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan di Cihargeulis:

“Kalau internal, biasanya dibicarakan langsung. Lewat rapat kecil, atau ngobrol santai sama RW dan pendamping.”

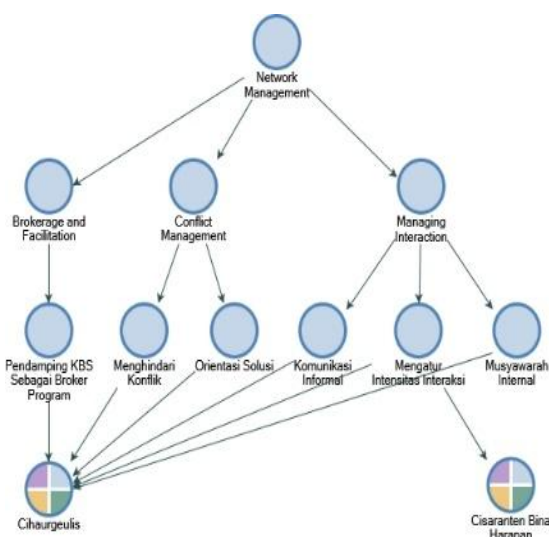
“Kalau internal RW, kami selesaikan lewat musyawarah. Jadi dibicarakan baik-baik, dicari solusi yang paling mungkin dijalankan.”

Kondisi ini menempatkan manajemen jaringan sebagai elemen kunci yang menjaga agar jejaring tetap berjalan meskipun fondasi kognitif, sosial, dan institusional belum sepenuhnya kuat.

Sehingga dalam praktiknya, pengelolaan jejaring KBS lebih banyak diarahkan pada upaya menjaga stabilitas relasi daripada menyelesaikan persoalan secara struktural. Temuan lapangan menunjukkan bahwa aktor wilayah cenderung menghindari konflik terbuka dan memilih penyelesaian melalui musyawarah internal serta komunikasi langsung baik di Cihaurgeulis maupun di Cisaranten Bina Harapan. Strategi ini tercermin dalam praktik pengaturan intensitas dan lingkup interaksi, di mana tidak semua persoalan dibawa ke forum formal atau melibatkan seluruh aktor jejaring. Pendekatan tersebut membantu mencegah eskalasi konflik dan menjaga keberlanjutan hubungan kerja, namun sekaligus membatasi ruang kolaborasi lintas aktor yang lebih luas.

Selain itu, aktor wilayah Cihaurgeulis sering menggunakan pendekatan bertahap untuk menghindari resistensi. Perubahan tidak dilakukan secara langsung, tetapi diperkenalkan sedikit demi sedikit melalui contoh praktik atau ajakan personal. Aktor juga mempertimbangkan hubungan jangka panjang dengan warga ketika mengambil keputusan, sehingga beberapa persoalan ditangani secara tidak langsung. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa manajemen jejaring dijalankan dengan sensitivitas sosial yang tinggi, meskipun konsekuensinya adalah lambatnya proses perubahan.

Hasil analisis Nvivo pada seluruh transkrip wawancara dan dokumen kebijakan memperlihatkan bahwa manajemen jejaring KBS berpusat pada tiga mekanisme utama, yaitu pengelolaan interaksi internal, pengelolaan konflik, dan fungsi fasilitasi atau perantara. Visualisasi pengodean menunjukkan keterkaitan antara praktik musyawarah internal, strategi penghindaran konflik, orientasi pada solusi pragmatis, serta peran pendamping KBS sebagai broker komunikasi. Konfigurasi ini membentuk jejaring yang relatif lentur dan adaptif, namun bergantung pada kapasitas aktor penghubung dan komitmen individu tertentu. Dengan demikian, manajemen jejaring dalam KBS berperan sebagai mekanisme stabilisasi yang memungkinkan jejaring tetap berfungsi, meskipun tingkat integrasi dan transformasi struktural masih terbatas.



**Gambar 5. Pola Network Management dalam Jejaring Kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah**

Sumber: Data primer diolah peneliti menggunakan Perangkat Nvivo 12 (2026)

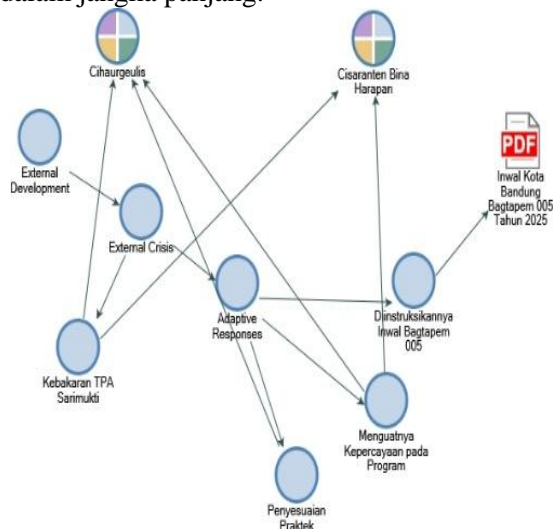
### E. External Development

Pengembangan eksternal dalam jejaring kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) merujuk pada dinamika di luar kendali langsung aktor lokal yang memengaruhi arah dan intensitas implementasi program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jejaring KBS di Cihaurgeulis dan Cisaranten Bina Harapan tidak beroperasi dalam ruang yang tertutup, melainkan berada dalam konteks kebijakan kota dan situasi persampahan yang terus berubah. Tekanan kebijakan dari pemerintah kota, seperti penetapan target KBS dan tuntutan administratif, membentuk kerangka eksternal yang harus direspons oleh aktor di tingkat wilayah. Kondisi ini menjadikan perkembangan eksternal sebagai konteks yang membingkai, bukan menentukan secara langsung, jalannya jejaring kebijakan.

Selain tekanan kebijakan, perkembangan eksternal juga hadir melalui peristiwa krisis persampahan, terutama gangguan pengelolaan TPA Sarimukti. Temuan lapangan menunjukkan bahwa krisis tersebut tidak hanya dipersepsikan sebagai hambatan, tetapi juga dimaknai sebagai pengalaman kolektif yang memperkuat kesadaran dan legitimasi Program KBS di tingkat lokal. Dalam beberapa kasus, krisis eksternal justru mendorong warga dan aktor wilayah untuk memandang KBS sebagai kebutuhan nyata, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan demikian, pengaruh perkembangan eksternal

dimediasi oleh pengalaman langsung aktor dan masyarakat dalam menghadapi dampak krisis.

Aktor lapangan baik di Cihargeulis maupun di Cisaranten Binaharapan mengamati bahwa perhatian masyarakat terhadap isu sampah meningkat pada periode tertentu, terutama ketika terjadi gangguan pengangkutan atau penumpukan sampah. Pada masa tersebut, diskusi tentang KBS lebih mudah diterima oleh warga. Namun, ketika situasi kembali normal, perhatian masyarakat cenderung menurun. Pola ini membuat aktor harus menyesuaikan strategi komunikasi sesuai dengan momentum eksternal yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh perkembangan eksternal bersifat fluktuatif dan tidak selalu dapat dipertahankan dalam jangka panjang.



**Gambar 6. Pola Exqtternal Development dalam Jejaring Kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah**

Sumber: Data primer diolah peneliti menggunakan Perangkat Nvivo 12 (2026)

Hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa perkembangan eksternal memengaruhi jejaring KBS melalui respons adaptif aktor, seperti penyesuaian praktik dan penguatan kepercayaan terhadap program. Visualisasi pengodean memperlihatkan bahwa krisis persampahan dan instruksi kebijakan tidak bekerja secara linier, melainkan dinegosiasikan dalam jejaring melalui strategi adaptasi yang berbeda antarwilayah. Konfigurasi ini membentuk jejaring yang responsif namun rentan terhadap perubahan konteks eksternal. Dengan demikian, pengembangan eksternal dalam KBS berperan sebagai pemicu penyesuaian incremental yang meringkai terlihatnya kemampuan aktor lokal dalam

mengelola ketidakpastian dan menjaga keberlanjutan jejaring kebijakan.

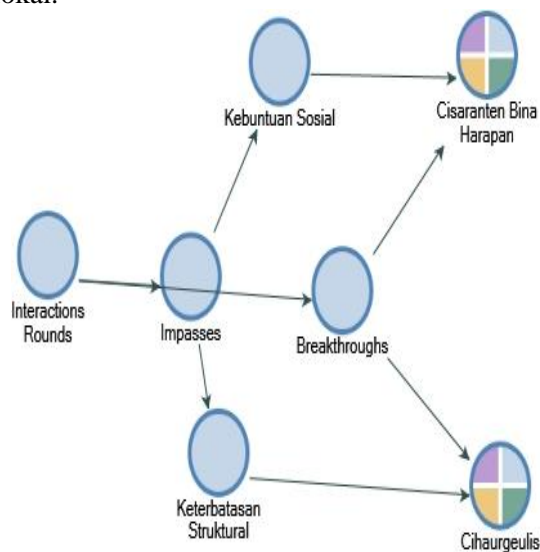
## F. Interaction Rounds

Proses interaksi dalam jejaring kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) berlangsung secara bertahap dan tidak linier, membentuk putaran interaksi yang diwarnai oleh negosiasi, kebuntuan, dan penyesuaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa interaksi antaraktor di Cihargeulis dan Cisaranten Bina Harapan tidak bergerak secara progresif menuju konsensus, melainkan mengalami fase stagnasi atau impasses yang berulang. Kebuntuan tersebut muncul baik dalam bentuk kebuntuan sosial, seperti menurunnya partisipasi dan kelelahan aktor, maupun kebuntuan struktural yang berkaitan dengan keterbatasan sarana, pendanaan, dan kapasitas pengolahan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebuntuan merupakan bagian inheren dari dinamika jejaring, bukan anomali dalam proses kebijakan.

Dari hasil wawancara bersama beberapa informan di Cisaranten Bina Harapan dapat dilihat bahwa Interaksi antaraktor di Cisaranten Bina Harapan tidak selalu berlangsung secara simultan, melainkan terfragmentasi dalam berbagai forum. Beberapa keputusan penting justru diambil di luar forum resmi, seperti setelah kegiatan lapangan atau melalui komunikasi informal. Interaksi semacam ini mempermudah koordinasi cepat, tetapi menyulitkan pencatatan proses secara sistematis. Akibatnya, pengetahuan tentang keputusan sering melekat pada individu tertentu, bukan pada mekanisme bersama. Hal ini memengaruhi keberlanjutan interaksi ketika terjadi pergantian aktor.

Hasil analisis NVivo memperlihatkan bahwa kebuntuan sosial lebih dominan di Cisaranten Bina Harapan, sementara kebuntuan struktural lebih menonjol di Cihargeulis. Visualisasi pengodean menunjukkan bahwa impasses tidak menghentikan jejaring sepenuhnya, tetapi menurunkan intensitas interaksi dan membatasi ruang kolaborasi. Dalam konteks tersebut, proses interaksi tetap berlanjut melalui mekanisme adaptif yang bersifat persuasif dan bertahap. Breakthrough yang muncul tidak berbentuk perubahan struktural yang besar, melainkan pergeseran kecil melalui penguatan komunikasi, penyesuaian fokus kegiatan, dan pemanfaatan

aspek yang masih berada dalam kendali aktor lokal.



**Gambar 7. Pola *Interactions Rounds* dalam Jejaring Kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah**

Sumber: Data primer diolah peneliti menggunakan Perangkat Nvivo 12 (2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa *interaction rounds* dalam jejaring KBS berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang memungkinkan jejaring tetap berjalan di tengah keterbatasan. *Breakthrough* dipahami bukan sebagai solusi final, tetapi sebagai capaian sementara yang menjaga keberlangsungan interaksi. Dengan demikian, proses interaksi dalam KBS membentuk dinamika kebijakan yang kumulatif, di mana kebuntuan dan terobosan saling bergantian dalam mendingkai arah implementasi program. Dalam kerangka jejaring kebijakan, efektivitas tidak diukur dari ketiadaan kebuntuan, melainkan dari kemampuan aktor mengelola putaran interaksi secara berkelanjutan.

### G. Outcomes

*Outcomes* dalam jejaring kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) tidak muncul sebagai capaian tunggal yang bersifat final, melainkan sebagai hasil kumulatif dari rangkaian interaksi, penyesuaian, dan pembelajaran yang berlangsung dalam jejaring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hasil jejaring KBS di Cihaurgeulis dan Cisaranten Bina Harapan berkembang secara berlapis, mencakup hasil substantif, hasil prosesual, dan hasil institusional. Ketiga dimensi hasil tersebut saling berkaitan, namun tidak berkembang secara serempak maupun merata antarwilayah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi outcomes KBS perlu ditempatkan dalam konteks dinamika jejaring, bukan semata-mata pada pencapaian target formal.

Secara substantif, *outcomes* jejaring KBS terlihat pada perubahan praktik pengelolaan sampah di tingkat lokal, seperti berkurangnya sampah residu, meningkatnya pengolahan sampah organik, serta pemanfaatan sampah anorganik. Meskipun capaian ini belum merata dan belum sepenuhnya optimal, beberapa aktor menilai adanya pengurangan timbulan sampah serta peningkatan kebersihan lingkungan sebagai hasil nyata dari pelaksanaan KBS. Hal tersebut disampaikan secara eksplisit oleh salah satu informan di Cihaurgeulis sebagai berikut:

“Secara keliatannya ya, cukup baik. Sampah berkurang, organik terolah, residu berkurang. Ekonomi dari bank sampah ada, walaupun bukan besar.”

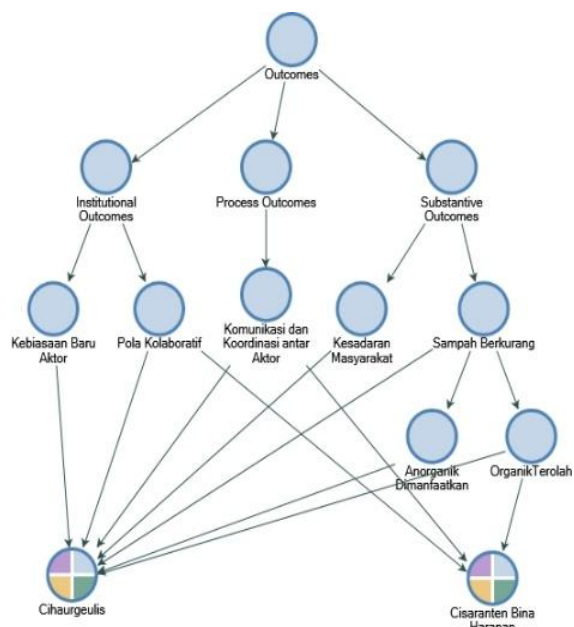
Hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa capaian substantif ini berkorelasi dengan tingkat kesadaran masyarakat dan konsistensi praktik pemilahan yang berkembang di masing-masing wilayah. Meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya optimal dan bervariasi antarwilayah, hasil substantif KBS mencerminkan kemajuan bertahap yang relevan dengan kapasitas aktor dan kondisi lokal. Dengan demikian, outcomes substantif dalam jejaring KBS lebih tepat dipahami sebagai proses perbaikan gradual daripada pencapaian kebijakan yang bersifat ideal.

Selain capaian substantif, *outcomes* jejaring KBS juga tampak kuat dalam dimensi prosesual. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan KBS membuka dan mempertahankan ruang interaksi antaraktor, yang tercermin dalam meningkatnya komunikasi, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat. Salah satu informan di Cisaranten Bina Harapan menjelaskan bahwa meskipun pengurangan volume sampah belum signifikan, pelaksanaan program KBS memberikan dampak positif pada proses sosial di tingkat warga. Program ini mendorong meningkatnya interaksi dan komunikasi antarwarga melalui kegiatan yang lebih rutin di lingkungan masyarakat.

Hasil analisis NVivo memperlihatkan bahwa terjaganya proses interaksi ini berperan penting dalam menopang keberlanjutan jejaring, meskipun intensitas kolaborasi tidak selalu stabil. Dalam konteks ini, outcomes prosesual berfungsi sebagai fondasi relasional yang

memungkinkan jejaring tetap berjalan di tengah kebuntuan dan keterbatasan struktural yang dihadapi aktor lokal.

Sebagian aktor menilai keberhasilan KBS dari kemampuan menjaga konsistensi kegiatan meskipun tanpa dukungan tambahan. Di beberapa wilayah, keberlanjutan aktivitas sederhana dianggap lebih penting daripada ekspansi program. Warga Cihargeulis juga menilai hasil program dari perubahan kecil yang langsung dirasakan, seperti kebersihan lingkungan sekitar rumah. Namun, aktor menyadari bahwa capaian tersebut mudah menurun ketika intensitas pendampingan berkurang. Temuan ini melengkapi gambaran bahwa *outcomes* KBS bersifat rapuh dan membutuhkan dukungan berkelanjutan.



Gambar 8. Pola *Outcomes* dalam Jejaring Kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah

Sumber: Data primer diolah peneliti menggunakan Perangkat Nvivo 12 (2026)

*Outcomes institusional* dalam jejaring KBS tercermin pada perubahan kebiasaan, internalisasi norma baru, serta terbentuknya pola kolaboratif yang lebih mapan di tingkat lokal. Visualisasi NVivo menunjukkan bahwa perubahan tersebut lebih banyak muncul sebagai pembiasaan praktik dan relasi, bukan sebagai pembentukan aturan formal baru. *Outcomes* yang dihasilkan merupakan produk dari interaction rounds yang berulang, di mana kebuntuan dan terobosan kecil membentuk arah kebijakan secara kumulatif. Dengan demikian, efektivitas jejaring KBS tidak diukur dari keberhasilan akhir yang bersifat statis,

melainkan dari kemampuan jejaring untuk beradaptasi, menjaga keberlanjutan interaksi, dan membentuk perubahan bertahap dalam praktik dan perilaku aktor di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika jejaring kebijakan Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) dibentuk oleh keterkaitan erat antara faktor kognitif, sosial, institusional, manajemen jejaring, perkembangan eksternal, dan proses interaksi. Faktor kognitif menentukan cara aktor memaknai tujuan dan urgensi KBS, yang selanjutnya memengaruhi pola relasi sosial dan tingkat keterlibatan masyarakat. Faktor sosial dan institusional membingkai ruang interaksi aktor melalui relasi yang bersifat strategis, personalisasi institusi, serta tekanan administratif yang menyertai implementasi program. Dalam konteks tersebut, jejaring KBS tidak berkembang dalam kondisi yang homogen, melainkan menunjukkan variasi konfigurasi dan capaian antarwilayah.

Manajemen jejaring, perkembangan eksternal, dan proses interaksi berperan sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana jejaring tetap berjalan di tengah keterbatasan. Manajemen jejaring dijalankan secara pragmatis untuk menjaga stabilitas relasi, sementara perkembangan eksternal, seperti tekanan kebijakan dan krisis persampahan, memicu penyesuaian strategi aktor. Proses interaksi berlangsung melalui putaran interaksi yang berulang, ditandai oleh kebuntuan sosial maupun struktural serta terobosan yang bersifat bertahap. *Outcomes* yang dihasilkan dari dinamika tersebut muncul secara berlapis, mencakup hasil substantif, prosedural, dan institusional yang berkembang tidak serempak, tetapi saling menopang dalam menjaga keberlangsungan jejaring kebijakan.

Dalam perspektif *governance network* sebagaimana dikemukakan oleh Klijn et al. (2025), temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak ditentukan oleh kelengkapan desain kebijakan atau kekuatan instrumen formal semata. Implementasi KBS di tingkat lokal menunjukkan bahwa kebijakan berkembang melalui negosiasi berkelanjutan antaraktor dengan kapasitas dan kepentingan yang beragam. Kebuntuan dan keterbatasan yang muncul bukan merupakan kegagalan jejaring, melainkan bagian inheren dari proses kebijakan yang bersifat dinamis. Dalam konteks ini, keberhasilan jejaring lebih tepat dipahami sebagai kemampuan aktor untuk mengelola

kompleksitas dan mempertahankan interaksi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa jejaring kebijakan KBS di Cihaurgeulis dan Cisaranten Bina Harapan berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan kebijakan tetap berjalan meskipun tidak mencapai kondisi ideal. Outcomes yang dihasilkan tidak mencerminkan pencapaian final, melainkan stabilisasi sementara dari praktik, relasi, dan norma yang terus berkembang. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan berbasis jejaring di tingkat lokal perlu dipahami sebagai proses jangka panjang yang dibentuk oleh interaksi, penyesuaian, dan pembelajaran kolektif, bukan sebagai implementasi linier dari desain kebijakan yang bersifat deterministik.

#### SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kawasan Bebas Sampah (KBS) di tingkat lokal tidak berlangsung sebagai proses teknokratis yang linier, melainkan sebagai dinamika jejaring kebijakan yang kontekstual dan adaptif. Variasi capaian antarwilayah dipengaruhi oleh konfigurasi relasi antaraktor, kapasitas pengelolaan jejaring, serta kemampuan aktor dalam menyesuaikan strategi implementasi terhadap kondisi lokal. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan atau instrumen formal, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan pembelajaran kolektif yang berkembang dalam jejaring kebijakan di tingkat lokal.

Hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas jejaring KBS lebih ditentukan oleh kemampuan aktor mengelola interaksi, menjaga keberlangsungan relasi, dan menyesuaikan strategi di tengah keterbatasan sumber daya. Kebuntuan sosial maupun struktural tidak menghentikan jejaring, tetapi membentuk putaran interaksi yang mendorong penyesuaian dan terobosan bertahap. Outcomes yang dihasilkan berkembang secara berlapis, mencakup hasil substantif, prosesual, dan institusional yang tidak selalu seimbang, namun saling menopang dalam menjaga keberlanjutan kebijakan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis jejaring di tingkat lokal berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam menghadapi kompleksitas dan

ketidakpastian. Keberhasilan kebijakan lebih tepat dipahami sebagai kemampuan jejaring untuk mempertahankan interaksi, membangun pembelajaran kolektif, dan membentuk perubahan praktik secara berkelanjutan, bukan sebagai pencapaian target yang bersifat final.

Implikasinya, penguatan Program Kawasan Bebas Sampah tidak hanya memerlukan perluasan target administratif, tetapi juga pengelolaan jejaring yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas aktor lokal, serta penguatan mekanisme interaksi yang memungkinkan pembelajaran dan kolaborasi antaraktor berlangsung secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, S., Sarkhel, P., & Mukhopadhyay, S. (2015). Municipal solid waste management, household health hazards, and urban environmental degradation. *Journal of Environmental Health Science and Engineering*, 13(1), 1–12.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2020). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3), 124–130.
- Deny. (2025). Kebakaran TPPAS Sarimukti dan dampaknya terhadap pengelolaan sampah Kota Bandung. *Media Indonesia*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. (2025). *Laporan monitoring dan evaluasi Program Kawasan Bebas Sampah*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Herlambang. (2025). Penumpukan sampah pascakebakaran Sarimukti di Kota Bandung. *Pikiran Rakyat*.
- Klijn, E. H., Steijn, B., & Edelenbos, J. (2025). *Governance networks: Theories, concepts, and applications*. London: Routledge.
- Koontz, T. M., & Newig, J. (2014). From planning to implementation: Top-down and bottom-up approaches for collaborative environmental governance. *Policy Studies Journal*, 42(4), 504–527.
- Kushwah, S., Singh, R., & Dhir, A. (2023). *Community participation and*

- collaborative governance in waste management policies. *Journal of Environmental Management*, 329, 117038.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. Jakarta: KLHK.
- Méndez-Lazarte, L., Rojas-Valencia, M. N., & García-González, M. (2023). Household waste management and urban environmental pressures. *Waste Management & Research*, 41(2), 173–184.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pemerintah Kota Bandung. (2018). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2021). *Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2023). *Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 146/DLH/2023 tentang Pelaksanaan Program Kawasan Bebas Sampah*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2024). *Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.1439.DLH/2024 tentang Penetapan Target Program Kawasan Bebas Sampah*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2025). *Instruksi Wali Kota Bandung Nomor 005-Bagtapem/2025 tentang Optimalisasi Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Bandung*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pradana. (2025). Evaluasi krisis pengelolaan sampah pasca longsor TPA Leuwigajah. *Kompas*.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding governance: Ten years on. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264.
- Syafei, M., & Susanti, R. (2025). Dampak pembatasan ritasi sampah akibat krisis TPPAS Sarimukti. *Tempo*.
- Yadav, P., & Samadder, S. R. (2018). A review of solid waste management in urban areas. *Journal of Environmental Management*, 227, 145–158.